

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Suriyaman Mustari Pide. 2009. *Hukum Adat Dulu Kini dan Akan Datang*. Makassar: PT Pelita Pustaka.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Adrian Sutedi. 2013. *Peralihan Hak Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2006. *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat sebagai Tanda Bukti Hak atas Tanah*. Jakarta: Bina Cipta.
- Boedi Harsono. 2003. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- , 2005. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan.
- Dinda Keumala dan Setiyono. 2009. *Tanah dan Bangunan*. Jakarta: Redaksi Raih ASA Sukses.
- Hari Sasangka. 2005. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Irene Eka Sihombing. 2005. *Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Kartasapoetra dan Setiady. 1991. *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Serfanto Dibyo, Iswi Hariyani dan Citra Yustisia. 2012. *Panduan Lengkap Mengurus Dokumen Properti*. Jakarta: PT. Buku Seru
- Rusmadi Murad. 1977. *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Supriadi. 2010. *Hukum Agraria*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Urip Santoso. 2006. *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

----- . 2013. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Prenada Media Group.

## **JURNAL**

Abdul Jabar. 2018. *Kekuatan Hukum Surat Girik Terhadap Penguasaan Hak atas Tanah Dalam Hukum Agraria Nasional*. Jurnal Al Ahwal, Vol.10 No.1.

Annisa Oktaviani dan Harjono. *Kekuatan Pembuktian Surat Letter C dalam pemeriksaan sengketa tanah di persidangan (studi kasus putusan Mahkamah Agung Perkara No: 816 K/Pdt/2016)*. Jurnal Verstek. Vol. 7 No. 1.

Muhammad Ilham Arisaputra dan Sri Wildan Ainun Mardiah. *Kedudukan Hukum Tanah Adat dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan di Indonesia: Studi Komparatif*. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Fakultas Hukum Unhas. Vol. 27 No. 2 September 2019.

Nirwana, Farida Patittingi, dan Sri Susyanti Nur. 2018. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah Sesungguhnya dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Rincik Palsu*. Jurnal Pagaruyuang Law Journal, Vol.1 No.2.

Fredik Mayore Saranaung. "Peralihan Hak atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997". Lex Crimen. Fakultas Hukum Unsrat. Vol. VI No. 1 Jan-Feb 2017

## **SKRIPSI**

Fitriana Rakhma Rasyid. 2014. *Kekuatan Pembuktian Rincik Sebagai alat Bukti Surat Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt/2005)*. Skripsi. Program Sarjana. Universitas Hasanuddin Makassar

Munawir. 2016. *Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Pembuktian Rincik dalam Perkara Perdata*. Skripsi. Program Sarjana. UIN Alauddin Makassar. Makassar.

Prasetya Kamila. 2008. *Tinjauan Yuridis Kedudukan Peralihan Hak atas Tanah Secara Pinjam Pakai dan Pendaftarannya*. Skripsi. Program Sarjana. Universitas Sumatera Utara

## **TESIS**

Astte Ariana Dorthia F. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Yang dikuasai Tanpa Hak Oleh Pihak Lain Dihubungkan Dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang pokok Agraria*. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Pasundan. Bandung.

Winarni Nimas Aysah. 2007. *“Girik dianggap sebagai bukti kepemilikan atas tanah di Indonesia (analisis kasus di kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat)”*. Tesis. Program Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PP 37/1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah  
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah